



PERAN PEREMPUAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DI KOTA MADIUN

Sintya Galuh Rusianti*¹

¹Program Studi Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Madiun

Accepted: 01 Oktober 2022. Approved: 26 Oktober 2022. Published: 04 November 2022.

ABSTRAK

Perkembangan tentang metode pembayaran pajak melalui digital (*E-Tax*) sudah mulai berkembang terutama di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam membayarkan pajaknya terutama pajak restoran. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berupa kendala dalam pelaksanaan pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (*E-Tax*) terhadap pajak restoran dan solusi penanganannya. Penelitian ini dilakukan melalui hasil wawancara bersama pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, wajib pajak masih ada yang melakukan tindak kecurangan biarpun pada sistem *E-Fiskus* sudah terdeteksi. Solusi yang dilakukan BPPD kabupaten Sidoarjo guna menangani *E-Tax* di Kabupaten Sidoarjo yaitu sosialisasi secara intens dengan kejaksaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pelanggaran pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk restoran dan menerapkan sanksi perpajakan.

Research Paper

Journal of Social and Political Science Society

Kata Kunci: E-Tax, Pengawasan, Pajak Restoran, Kabupaten Sidoarjo.

PENDAHULUAN

Selama ini ada masyarakat beranggapan bahwasanya dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan tersebut terlihat karena adanya *image* yang terbangun di pikiran masyarakat mengenai politik selalu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun di dunia politik masih minim, termasuk di belahan negara dengan tingkat demokrasi dan hak asasinya kecil (Subiakto, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurtakwa, (2017) dan Riyanti, (2021) mayoritas kursi dewan perwakilan saat ini di belahan dunia manapun masih dihuni oleh laki-laki. Lebih lanjut, beliau menyebutkan, dari 86 negara yang memiliki lebih dari 418 partai politik, perempuan hanya menduduki 18,7% pada sektor pemimpin negara/presiden, 10,8% pemimpin negara/wakil, 7,6% menjadi sekretaris jenderal dan 9% menjadi juru bicara partai. Hal

tersebut terjadi, karena secara historis kaum pria memang sudah selalu dominan dalam segala hal tentang politik, sedangkan kaum perempuan mayoritas melakukan pekerjaan di dapur, melayani suami, mengasuh anak dan lain sebagainya. Data diatas juga menjawab bahwasanya kesetaraan dan keadilan gender didunia masih belum optimal. Karena realitanya menyatakan dengan jelas partisipasi perempuan di jabatan politik dunia internasional yang ternyata masih sangat minim dan begitu memprihatinkan.

Menurut sensus yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah perempuan di Indonesia adalah 118,01 juta jiwa atau hampir 50 persen dari seluruh populasi atau lebih banyak dari total jumlah penduduk di ketiga negara Malaysia, Singapura dan Filipina (BPS, 2015). Namun, besarnya jumlah tersebut tidak terlihat ketika berbicara tentang perempuan pada perwakilan parlemen atau lembaga

* Correspondance Address

E-mail: viralavita.meyrisa@gmail.com

pengambil keputusan politik di Indonesia. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, bahwasanya kaum perempuan mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (*affirmative action*) sudah diterapkan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen.

Berdasarkan data diatas, Menurut (Suarmini et al., 2018), pemerintah sudah berupaya maksimal dalam menunjukan apresiatifnya terhadap perkembangan penyerataan gender. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatnya minat dan peran perempuan dalam membangun politik sehat di Indonesia. Tujuan pemerintah bisa dikatakan cukup signifikan, karena jika di lihat pada saat ini banyak aktivis perempuan yang mulai bermunculan baik di media masa maupun media cetak. Penelitian dari Mujiastuti, (2019) menyebutkan, maraknya aktivis perempuan ini bisa menjadi tren positif untuk meningkatkan minat perempuan terhadap dunia politik. Saat ini kursi pemerintahan baik secara eksekutif, legislative dan yudikatif bisa terlihat mulai banyak kaum perempuan.

Tentunya, pada tahun-tahun berikutnya diharapkan tren ini bisa meningkat secara signifikan. Semakin maraknya kaum perempuan yang bermunculan maka semakin tinggi juga pemikiran masyarakat terhadap kaum perempuan. Namun, disatu sisi dengan banyaknya spot politik yang dipegang oleh kaum perempuan justru dapat meningkatkan permasalahan pada kaum laki-laki yang pada dasarnya kodrat yang dimiliki yaitu adalah seorang pemimpin. Permasalahan tersebut berupa kecemburuan social, menurunnya kepercayaan diri dan menurunnya kepercayaan terhadap kaum laki-laki. Seperti yang diteliti oleh Wasi, (2020) bahwasanya lajur politik modern lebih baik dilakukan oleh kaum laki-laki, karena perempuan cenderung menggunakan perasaannya ketika berpolitik. Penelitian selanjutnya dari Kurniati, (2020) bahwasanya pemberlakuan kuota maksimal

30% untuk kaum perempuan dalam pemerintahan dapat menekan konflik internal berupa kecemburuan social yang terjadi pada kaum laki-laki. Berbagai penelitian telah dilakukan guna mengantisipasi permasalahan yang terjadi, salah satunya dengan meneliti mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh kaum perempuan sehingga dapat meminimalisir adanya konflik bagi kaum laki-laki.

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Gun Gun Heryanto, 2018). Menurut Putri, (2020) komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik terutama di Indonesia. Madiun merupakan salah kota di Indonesia dengan tingkat rasio terhadap perempuan lebih besar dari laki-laki, yaitu sebesar 51,3% (Ebtawan, 2012). Madiun juga merupakan salah satu kota dengan penyumbang anggota parlemen dan pemerintahan perempuan terbesar ke 5 setelah Surabaya di Jawa Timur (Wati, 2017). Fakta bahwasanya setelah masa orde baru pemberdayaan perempuan di kota madiun cenderung meningkat.

Hal ini didasarkan pada banyaknya lembaga darma wanita, PKK dan organisasi perempuan lain yang semakin berkembang. Ada masalah yang sangat strategis untuk dikaji lebih jauh pada daerah ini, yaitu mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik partai beserta segala kendala dan faktor pendukung keterlibatan mereka. Hal ini sangat penting diteliti karena dalam perspektif politik modern, logikanya, agenda yang kongkrit untuk memajukan peran dan harkat perempuan Indonesia khususnya di Kota Madiun sudah selayaknya dijadikan salah satu tawaran utama oleh partai politik yang ingin melapangkan jalannya ke gedung parlemen.

Alasan lain yang tidak kalah pentingnya meneliti tentang masuknya perempuan ke sektor politik adalah untuk mengetahui lebih jauh persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam komunikasi politik partai. (Zamroni, 2013) dalam penelitiannya mengenai perempuan dalam

kajian komunikasi politik dan gender mendapatkan hasil yaitu, adanya komunikasi yang baik antara perempuan dan laki-laki dalam suatu partai dapat meningkatkan mutu dan kinerja yang baik bagi perempuan sehingga tidak adanya kecemburuan social terbentuk bagi kaum laki-laki dan perempuan.

Adeni & Harahap, (2018) juga melakukan penelitian serupa mengenai komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik, mendapatkan hasil bahwasanya peran perempuan sangatlah vital pada sector politik karena adanya beberapa sector yang harus dikerjakan oleh kaum perempuan, sehingga komunikasi politik sangat perlu dilakukan guna terjalinnya koordinasi yang baik pada sector tersebut. Kemudian dari Wahid, (2014) pada penelitiannya yang berjudul Otonomi Daerah Dan Komunikasi Politik Perempuan: (Analisis Gramscian Kandidat Perempuan Parlemen Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009), mendapatkan hasil berupa komunikasi politik yang dilakukan perempuan dapat menjadikan perempuan lebih mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama, terutama yang terjadi pada pemilu di Daerah DKI Jakarta pada tahun 2009.

Dari penelitian diatas didapati bahwasanya peran perempuan dalam dunia komunikasi politik partai sangatlah penting namun, berbagai penelitian tersebut hanya membahas mengenai peran perempuan dan komunikasi politik partai, belum ada pokok kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam komunikasi politik partai. Untuk itu diambil penelitian skripsi yang berjudul "peran perempuan dalam komunikasi politik partai di kota madiun" guna mengatasi permasalahan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Salindeho, (2021) partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi - pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir

atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa; "Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*)".

Hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955, Partisipasi perempuan di bidang politik sangat dibutuhkan karena masyarakat perlu memiliki pandangan yang seimbangan diantara kebutuhan laki-laki dan perempuan dan persyaratan-persyaratan. Selain itu kebijakan publik yang dirumuskan juga harus merepresentasikan kepentingan keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bantarani, (2019) Secara umum, partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan oleh pemerintah.

Konsep Gender

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim (Salim, 2021). Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan wanita yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita berhubungan dengan gender feminin. Kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Secara teoretik, terdapat tiga definisi mengenai gender yang kami cantumkan di sini, sebagai rujukan (Salim, 2021).

Pertama, gender adalah pembedaan peran, identitas, serta hubungan antara perempuan dan lelaki yang merupakan hasil bentukan masyarakat. Kedua, gender adalah seperangkat harapan, keyakinan, dan stereotip yang seharusnya dilakukan oleh seorang individu, laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sosial mereka. Ketiga,

gender adalah seperangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin”.

Ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada ketidak seimbangan akses ke sumber-sumber penting, yang meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, peranan yang menentukan, waktu yang leluasa, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik (Junariyah, 2018). Perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan berlangsung terus menerus dalam sejarah yang sangat panjang dan kompleks hingga sekarang. Ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial hingga banyak yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan (seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi), sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai sebuah kodrat.

Komunikasi Politik

Dari sudut penelitian, komunikasi politik telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik di Amerika maupun di Eropa Barat. Begitu pula dalam pembedaannya, komunikasi politik telah membagi kajian-kajian dalam bidang unsur-unsurnya, apakah itu komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khalayak politik, sampai pada metode analisis. Cukup banyak pernyataan para ahli yang menunjukkan kedekatan komunikasi dengan politik. Sebagaimana ditulis Muttaqin, (2016) misalnya, mengatakan bahwa “tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik.” Pernyataan lain datang dari Yusradi, (2020), bahwa: “.....tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.

(Astuti & Toni, 2020) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik

kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Menurut Muslimin, (2020) proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik menjadi penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pola-pola komunikasi politik, komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik yang terjadi di lingkungan yang bersangkutan. Dalam hal ini komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.

Dari sudut rujukan ilmiah (*reference*), pemikiran dari analisis (Fagen, 1969), Fagen berusaha menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang disajikan, membicarakan peristiwa-persitiwa politik yang berdimensi komunikasi. Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam melihat politik dan komunikasi masih memakai kerangka dasar (*framework*) dari Harold D. Lasswell (1948), yaitu: *Who says What, in Which Channel, To Whom, With What Effect*.

Komunikasi politik dalam perkembangannya harus dapat menjelaskan proses komunikasi yang telah dirumuskan oleh Jones, (2010), lebih khususnya lagi disiplin ilmu komunikasi politik dari berbagai pengkajian literatur secara periodik, buku-buku, dan literatur yang populer diarahkan kepada: 1). *Political communicator*, 2). *Political message*, 3). *The media of political communication*, 4). *The political audience*, 5). *Methods in the study of political*. Dengan demikian, adanya pembedaan pembahasan komunikasi politik, sepatutnya juga pengkajian dan penelitian diarahkan pada arah tersebut, sehingga dalam perkembangan yang dinamis tidak terlepas dari kerangka proses komunikasi.

Proses Komunikasi Politik

Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian *pesan-pesan* tertentu yang berasal dari sumber

(selaku pihak yang memprakarsai komunikasi) kepada *khalayak*, dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertntu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Sekalipun keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan, namun suatu analisis yang tersendiri terhadap masing-masing unsur perlu juga dilakukan (Subiakto, 2015). Analisis yang dimaksud berguna untuk mengenali lebih jauh mengenai peran setiap unsur agar pemahaman yang menyeluruh terhadap proses komunikasi politik dapat dicapai lebih baik.

Pada prinsipnya, komunikasi politik tidak hanya terbatas pada even-even politik seperti pemilu saja, tetapi komunikasi politik mencakup segala bentuk komunikasi yang dilakukan dengan maksud menyebarkan pesan-pesan politik dari pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa (OKA, 2018). Secara teoritis fenomena komunikasi politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat, seperti telah diuraikan sebelumnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik, tempat komunikasi itu berlangsung (Pohan, 2019). Karena itu, kegiatan komunikasi politik di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari proses politik nasional yang menjadi latar kehidupannya.

Efek Media dalam Komunikasi Politik

Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik. Konsekuensinya, pendekatan analisis yang digunakannyapun pada gilirannya lebih banyak menggunakan analisis media massa, terutama berkaitan dengan teori-teori hubungan antara media dan masyarakat, seperti teori tentang pesan, mekanisme penyebaran informasi yang terjadi, serta efek-efek psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya (Juditha, 2018). Terkait dengan hal ini, Kraus dan Davis dalam bukunya *The Effects of Mass Communication on Political Behaviour* menegaskan tema komunikasi politik telah dilakukan dan

dipublikasikan sejak 1959, memberikan informasi bahwa media juga melakukan konstruksi realitas politik dalam masyarakat (Kraus et al., 1976). Di samping itu, juga mengungkap masalah-masalah posisi komunikasi politik dalam kasus-kasus kegiatan politik praktis dalam proses transformasi dan pembentukan komunikasi politik masyarakat.

Sementara itu, Graber memandang bahwa komunikasi politik merupakan proses pembelajaran, penerimaan dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan (*customs*) atau aturan-aturan (*rules*), struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Sementara itu, Dan D. Nimmo dan Keith Sanders dalam *Handbook of Political Communication* (2017), juga mengungkap masalah-masalah komunikasi politik dalam kasus-kasus kegiatan politik praktis yang dikaitkan dengan peran media massa (Nimmo, D, 2017). Dalam konteks komunikasi politik, Dan Nimmo menjelaskan pengaruh-pengaruh politik dimobilisasi dan ditransmisikan antara institusi pemerintahan formal di satu sisi dan komunikasi memilih masyarakat pasa sisi lain. Pentingnya media massa dalam penyebaran politik diuraikan Reese dan Shoemaker telah coba membuka tabir tentang faktor-faktor yang sangat mempengaruhi isi media (Suriyani & Nuraflah, 2019).

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap isi suatu media, di antaranya adalah pengaruh pekerja media (penyiar atau jurnalis), pengaruh organisasi media, pengaruh ekstramedia, dan pengaruh ideologi. Makalah Reese dan Shoemaker tersebut menunjukkan bahwa pengaruh "siapa" (menurut taksonomi Lasswell) atau "kelompok yang mempengaruhi isi media" (menurut Reese dan Sheomaker) atau juga "komunikator politik" (yang oleh Nimmo disebut sebagai komunikator profesional) dalam menyampaikan "isi pesan" ternyata tidak kalah pentingnya dari pengaruh lainnya, seperti "media", "khalayak", dan "efek atau akibat komunikasi" yang dilakukan (Suriyani & Nuraflah, 2019).

Berkaitan dengan posisi penting komunikator dalam menentukan isi media, Nimmo secara detil membagi komunikator

politik ke dalam tiga kelompok, yaitu politikus, profesional, dan aktivis (Nimmo, D, 2017). Politikus sebagai komunikator politik dalam pelaksanaannya terkadang bertindak sebagai wakil partisan dan terkadang pula bertindak sebagai ideology (Shahreza, 2018). Sebagai wakil partisipan, komunikator politik mewakili kelompok tertentu dalam tawar-menawar dan mencari kompromi pada masalah-masalah politik. Mereka bertindak dengan tujuan mempengaruhi opini orang lain, mengejar perubahan atau mencegah perubahan opini. Mereka adalah makelar yang membujuk orang lain agar ikut dan setuju dengan ide yang ditawarkannya. Berdasarkan penjelasan diatas, efek media dalam komunikasi politik sangatlah penting terutama dalam meningkatkan citra politik. Citra politik akan berhubungan terhadap pelaksanaan politik yang terjadi.

Perempuan dalam Organisasi Politik

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi baik kemasyarakatan maupun politik diperhatikan secara khusus oleh Utaminingsih, (2017) Menurutnya, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki, menurut teori fungsionalis struktural, dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotipe gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi menurut Lips, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan.

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan (Utaminingsih, 2017). Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut (Latief et al., 2019), relasi gender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*).

Teori ini dinilai oleh kalangan penganut teori fungsionalis struktural terlalu bercorak ekonomi di dalam memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan. Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh budaya dalam masyarakat (Larasati & Ayu, 2020). Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda. Sehingga muncul berbagai aliran feminis agaknya masih memerlukan perjuangan panjang karena diantara gagasan-gagasannya ada yang dinilai kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari dunia publik (*public word*), yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki meminjam istilah Valerie Bryson.

Keterpurukan posisi perempuan yang diderita oleh perempuan dalam pengambilan peran publik adalah sebagai akibat dari perbedaan gender yang sudah mengakar dalam sosio-kultural masyarakat (Larasati & Ayu, 2020). Perlakuan yang menempatkan perempuan dengan tugas domestik telah menjadikan perempuan tidak memiliki keahlian, sumber daya dan akses yang lebih dibanding laki-laki. Lebih jauh, keterpurukan dan ketimpangan gender dalam tesis ini, akan lebih meyakinkan bila dipakai konsep marjinalisasi perempuan yang berbasis gender. Marjinalisasi, menurut (Yuniarti, 2020) merupakan proses penyingkiran atau proses pemiskinan secara ekonomi. Proses marjinalisasi mengakibatkan kemiskinan, dalam hal ini pemiskinan terhadap kaum perempuan yang disebabkan gender. Masih menurut Yuniarti, (2020), bahwa bentuk-bentuk marjinalisasi itu antara lain :

- a. Sebagai proses pengucilan (*expulsion*)
- b. Sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran (*marginilization*) dari pasar tenaga kerja
- c. Sebagai proses feminisasi atau segregasi
- d. Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang perempuan dalam organisasi politik yaitu adanya beberapa teori yang membatasi seperti teori fungsionalitas dan teori konflik. Teori

fungsionalitas lebih mengarah pada perempuan yang memiliki inferioritas dibanding kaum laki-laki. Sedangkan teori konflik berupa teori kaum wanita yang termarginalisasi karena pengaruh peran laki-laki sehingga kerap terlihat perempuan kurang bisa mengatasi masalah yang sedikit sulit.

Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting (Adeni & Harahap, 2018). Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking* dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Fauzi, 2017). Bila dicermati lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmative action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Diawali dengan

keputusan Negara mengenai perpolitikan di Negeri ini, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara No.2 tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU Pemilu No.10 tahun 2008 pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (Fauzi, 2017; Partini, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu keterwakilan perempuan dalam komunikasi politik pada dasarnya terletak pada tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan public yang dihadapinya. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki perempuan maka perempuan cenderung memobilisasi kaum perempuan lain terutama dengan alasan memiliki ikatan yang kuat antar kaum perempuan. Maka dari itu, terlihat para kaum perempuan cenderung solid ketika berkomunikasi politik dibanding laki-laki.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. *Setting* mengenai lokasi penelitian ini adalah sekretariat/ lingkungan rumah Narasumber penelitian yang berada di Kota Madiun. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan data (*Data Collection*) Reduksi data (*Data Reduction*, penyajian data (*Data Display*), dan *verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi politik dalam pemilihan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Setiap partai politik menggunakan saluran-saluran informasi yang efektif dalam menyampaikan pesan politiknya. Salah satu saluran yang digunakan

yaitu melalui perwakilan partai yang masuk dalam panggung politik. Dalam konteks ini tentu berkaitan dengan perempuan dan perannya sebagai komunikator pada pemilihan umum di Kota Madiun. Berdasarkan hasil wawancara bersama responden, beberapa jawaban didapatkan terkait peran perempuan dalam komunikasi politik partai terutama di Kota Madiun. Dari ibu rina menjawab:

“Perannya bisa juga menjadi komunikator sosialisasi politik. terjadinya sosialisasi politik ini penting kiranya dilakukan, mengingat tanpa sosialisasi politik para politisi tidak lebih dari orang-orang yang banyak berbicara tentang politik, tetapi tidak tahu memainkan peranan penting mereka sebagai politisi yang matang. Bagaimanapun mereka harus belajar menjadi politisi yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menjadi politisi yang matang, mereka harus belajar tahap demi tahap, seperti halnya seorang pemuda harus banyak belajar untuk menjadi orang dewasa. Yang di harapkan dari politisi perempuan dewasa ini adalah kemauan untuk belajar berpolitik secara demokratis”.

Komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, dan juga menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, dan bahkan mendukung revolusioner. Komunikator dalam komunikasi politik dapat berwujud individu, lembaga, maupun kumpulan orang. Seorang tokoh masyarakat atau pejabat, bahkan rakyat juga dapat bertindak sebagai sumber dalam komunikasi politik dan dapat dikatakan sebagai sumber individu. Pada kesempatan yang lain, memang secara jelas dapat dibedakan bahwa meskipun seseorang individu yang berbicara, tetapi menjuru bicarai suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai *collective source* atau sumber kolektif. Adapun jawaban lain diberikan terkait peran perempuan oleh ibu ismiati:

“Dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan lain, Kebijakan politik memang sangat berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik ini segala aktivitas kehidupan dapat

ditentukan. Adanya one gate policy atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitif gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan. Sebagai tindak lanjut, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat partisipasi peran perempuan dalam dunia politik. *Kedua*, bentuk partisipasi dengan mengikuti rapat umum demonstrasi dalam kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik atau kelompok kepentingan. *Ketiga*, bentuk partisipasi yang sebentar-sebentar. Bentuk partisipasi politik semacam ini dilakukan perempuan lewat diskusi kecil-kecilan di dalam keluarga, tempat kerja, atau di tempat lain. *Keempat*, partisipasi politik dengan memberikan suara. Partisipasi ini biasanya dilakukan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum, baik memilih wakil-wakil mereka dalam parlemen maupun memilih presiden dan wakil presiden.

Keempat jawaban tersebut merupakan bentuk suara yang diberikan beliau terhadap peran perilaku komunikasi politik perempuan yang telah dilaluinya. Berbeda dengan jawaban diatas ibu inda raya dan ibu lina menjawab:

“dapat mempengaruhi pemilu dan mempengaruhi pejabat pembuat kebijakan politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang mempengaruhi pemilihan umum bisa berupa; keberadaan seseorang dalam partai politik, pendaftaran untuk memilih, pemberian suara dalam pemilihan umum, pengambilan bagian dalam kampanye, mengikuti informasi tentang politik, masuk organisasi kepentingan umum dan politik, dan menghubungi pejabat pemerintah. Sedangkan untuk menyampaikan pesan politik sekaligus mempengaruhi para pejabat pembuat kebijakan, tentunya rakyat harus memiliki perwakilan. Dan perwakilan itu terjadi jika garis-garis komunikasi

menghubungkan publik dengan pembuat kebijakan dalam pembuatan kebijakan, garis yang menyalurkan preferensi kebijakan, keputusan dan penerimaan atau penolakan.

Hal ini terlihat bahwa perempuan dapat menjadi media penghubung ke masyarakat dan juga menjembatani kepentingan perempuan secara khusus, dan masyarakat secara umum. Peran perempuan sebagai komunikator politik juga dapat dilihat dari beberapa fraksi di DPRD Kota Madiun yang melibatkan perempuan pada bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan masyarakat, hingga pada badan pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perempuan yang ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 kemarin mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, hampir 80% calon *legislative* perempuan tersebut lulusan Strata-1. Mereka merupakan perempuan yang cukup berkompeten untuk ikut dalam percaturan politik dan mampu bersaing dengan calon *legislatif* laki-laki. Akan tetapi realita dilapangan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para calon *legislative* perempuan karena dari hasil perhitungan suara calon *legislative* laki-laki lebih banyak mendapatkan kursi dibandingkan calon *legislative* perempuan.

Partisipasi politik perempuan memang dianggap sangat kurang, baik dalam perwakilan parlemen sebagai pembuat kebijakan atau padataran pengurus partai. Komunikasi politik perempuan dalam politik merupakan salah satu wacana penting yang ingin segera direalisasikan. Setelah dilakukan wawancara terhadap peran, ditanyakan juga terkait perihal membangun komunikasi perempuan dalam politik. Seluruh jawaban responden dirangkum sebagai berikut:

“(a) Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaanya. (b) Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah. (c) Keseimbangan hak pemberdayaan

politik. (d) Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. (e) Perhatian yang cukup terhadap isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat. Itikad baik tentunya diwujudkan dengan menggiatkan berbagai kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan dan memunculkan organisasi dan kegiatan yang diharapkan dapat merangsang dan mengoptimalkan komunikasi perempuan dalam politik.

Beberapa usaha tersebut juga dapat dilihat berdasarkan observasi kantor yang terlihat berbagai dokumentasi dari Forum Wanita Keadilan yang merupakan forum bagi anggota dewan atau anggota legislatif perempuan untuk dapat melakukan sharing dan pendidikan politik terhadap kader perempuan. Bentuk komunikasi Politik perempuan Kota Madiun dari hasil penelitian di lapangan tampaknya cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas politik yang mereka ikuti.

Berdasarkan paparan data dari rangkuman berbagai hasil wawancara bersama ibu Rina, Lina, Ismiati dan Inda Raya, didapatkan 4 Peran perempuan dalam komunikasi politik partai Kota madiun berupa:

1. Dapat menjadi komunikator sosialisasi politik

Peranan perempuan sebagai komunikator politik pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara berbagai partai politik, tepatnya anggota legislatif dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan (Nurussa'adah, 2020). Pandangan yang melihat bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan di dalam kehidupan proses kehidupan badan legislatif pada khususnya. Bertolak dari teori tentang demokrasi, Teori demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan (Sarinastiti &

Fatimah, 2019). Dengan kata lain, pemerintah melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat, setidaknya pemerintah menghindarkan diri dari apa yang tidak dikehendaki oleh anggota masyarakat.

2. Dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan lain

Kebijakan politik memang sangat berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik ini segala aktivitas kehidupan dapat ditentukan. Dengan adanya perempuan yang sudah berkecimpung di dunia politik, perannya dapat juga meningkatkan partisipasi politik perempuan lain. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ainiyah, (2017) perempuan dengan daerah yang sudah memiliki partisipasi politik legislative akan lebih mudah menarik perempuan lain untuk turut serta mengikuti jejanya. Diperkuat oleh Maulia dkk., (2019) tingkat partisipasi perempuan dalam dunia politik lebih mudah ditingkatkan ketika ada salah seorang yang sudah mengawalinya. Jadi penting untuk daerah dengan tingkat partisipasi wanita rendah dalam politik untuk melakukan peningkatan mutu sehingga kedepannya perempuan dapat turut serta mengambil partisipasi peran dalam dunia politik.

Adapun jenis partisipasi perempuan dalam dunia politik menurut hasil wawancara bersama responden yaitu (1) Bentuk partisipasi dengan memperkuat peran perempuan dalam dunia politik. (2) Bentuk partisipasi dengan mengikuti rapat umum demonstrasi dalam kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik atau kelompok kepentingan. (3) Bentuk partisipasi yang sebentar-bentar. Bentuk partisipasi politik semacam ini dilakukan perempuan lewat diskusi kecil-kecilan di dalam keluarga, tempat kerja, atau di tempat lain. (4) Bentuk partisipasi politik dengan memberikan suara.

3. Dapat mempengaruhi pemilu

Perempuan dalam perannya juga dapat mempengaruhi pemilu, baik dari segi kontestasi ataupun komunikasi. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurannafi, (2018) bahwa saat ini sudah banyak perempuan yang menjadi juru kampanye pemilu hingga menjadi

koordinator pemenangan di berbagai wilayah. Strategi *lobbying* yang mereka lakukan juga sudah tidak bisa diragukan. Melalui relasinya, perempuan di tataran *legislative* bisa dijadikan alat untuk dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan berbagai kolega anggota legislatif di DPR. Menurut Sumarzan, (2021) biasanya kaum perempuan dalam memuluskan langkahnya di posisi puncak di Partai, komunikasi dilakukan secara intensif baik dengan sesama pengurus partai maupun sesama kolega di DPR.

4. Dapat Mempengaruhi pejabat pembuat kebijakan politik

Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Hal tersebut yang menyebabkan perempuan lebih mudah dalam mempengaruhi pejabat pembuat kebijakan. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap perempuan daripada sebaliknya. Ini sejalan dengan yang dikatakan Menurut Sumarzan, (2021) perempuan bisa diandalkan dalam kebutuhan mendesak terkait mempengaruhi pembuat kebijakan politik. Diperkuat oleh Nurannafi, (2018) situasi seperti ini membuat skor perempuan bisa lebih unggul dibanding laki-laki karena dalam mempengaruhi berbagai kebijakan, perempuan lebih cepat dan efektif dibanding laki-laki.

SIMPULAN

Bedasarkan hasil wawancara mendalam secara tatap muka dan pembahasan mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik partai di kota Madiun, maka dapat disimpulkan berupa peran perempuan dalam Komunikasi Politik Partai di Kota Madiun yakni berupa (1) Dapat menjadi komunikator sosialisasi politik Dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan lain, (2) Dapat mempengaruhi pemilu, dan (3) Dapat Mempengaruhi pejabat pembuat kebijakan politik

REFERENSI

Adeni, S., & Harahap, M. A. (2018). *Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam*

- Arena Politik. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2849>
- Ainiyah, N. (2017). Komunikasi Politik Perempuan. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 11(2), 307–330.
- Astuti, V. Y., & Toni, A. (2020). Media Sosial Komunitas untuk Meningkatkan Eksistensi Komunitas dalam Wacana Politik Pemilu Presiden 2019. *CARAKA: Indonesian Journal of Communications*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.25008/caraka.v1i1.38>
- Bantarani, A. (2019). *Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Study Perbandingan terhadap Jama'ah Pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan Jama'ah Pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ebtawan, J. N. P. (2012). *Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Madiun tahun 2002-2011*.
- Fagen, R. R. (1969). *The Transformation of Political Culture in Cuba*. Stanford University Press, Stanford, California (\$8).
- Fauzi, D. A. D. (2017). *Representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi tinjauan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32520/>
- Gun Gun Heryanto. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Jones, J. P. (2010). *Entertaining Politics: Satiric Television and Political Engagement*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Pekommas*, 3(1).
- Junariyah. (2018). *Konsep gender dalam perspektif pendidikan islam*. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Kraus, S., Davis, D., & Davis, D. of the C. for A. L. S. P. of L. D. (1976). *The Effects of Mass Communication on Political Behavior*. Pennsylvania State University Press.
- Kurniati, M. (2020). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Latief, A., Maryam, S., & Yusuf, M. (2019). Kesetaraan Gender dalam Budaya Sibaliparri Masyarakat Mandar. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.35329/fkip.v15i2.474>
- Maulia, N., Atika, A., & Sari, N. N. R. (2019). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Memperoleh Dukungan Publik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(2), 109–126.
- Mujihastuti, N. A. (2019). *Analisis Perubahan Kebijakan Arab Saudi Tentang Peran Perempuan Di Ranah Publik: Studi Kasus Royal Decree No. M/85 Tahun 2017*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Muslimin, K. (2020). *Buku Ajar Komunikasi Politik*. UNISNU PRESS.
- Muttaqin, L. R. (2016). *Strategi Komunikasi Istri Politisi dalam pemasaran Politik dalam Upaya membantu Karir Politik Suami di Kabupaten Garut*.
- Nimmo, D. (2017). The Oxford Handbook of Political Communication. In *The Oxford Handbook of Political Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001>
- Nurannafi, F. S. M. (2018). Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Kota Majalengka. *Inter Komunika*, 3(1), 14–29.
- Nurtakwa, N. (2017). *Strategi Politik Kader Partai Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Enrekang*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurussa'adah, E. (2020). Perempuan dan Komunikasi Politik pada Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 111–123.
- OKA, R. C. (2018). *Analisis Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Ganjar Pranowo Dan Taj Yasin Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023*. Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Partini, P. (2015). Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23440>

- Pohan, M. H. (2019). *Media Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Memilih Gubernur Muslim Sumatera Utara Tahun 2018*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, N. W. E. (2020). *Perempuan hindu dalam kajian komunikasi politik dan gender*. *Communicare*, 1(1), Article 1. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/communicare/article/view/756>
- Riyanti, R. (2021). *Perempuan Dalam Pusaran Pemilu*. Penerbit NEM.
- Salim, L. (2021). Kontruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kesenjangan antara Laki-Laki dengan Perempuan. *Sosio Religia*, 1(2).
- Salindeho, A. M. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Sitau Pada Pilkada Tahun 2018*. *JURNAL POLITICO*, 10(4).
- Sarinastiti, N., & Fatimah, P. S. (2019). Edukasi komunikasi politik dalam menciptakan kesadaran dan minat memilih perempuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 44–58.
- Shahreza, M. (2018). *Proses dan Elemen-Elemen Komunikasi Politik*.
- Suarmini, N. W., Zahrok, S., & Agustin, D. S. Y. (2018). Peluang dan Tantangan Peran Perempuan di Era Revolusi Industri 4.0. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5.
- Subiakto, H. (2015). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Prenada Media.
- Sumarzan, S. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (analisis meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dapil 3 aceh selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2).
- Suriyani, E., & Nurafiah, C. A. (2019). Peranan Harian Waspada dalam Menaikkan Elektabilitas Calon Gubernur Sumut. *Warta Dharmawangsa*, 59.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahid, U. (2014). *Otonomi Daerah Dan Komunikasi Politik Perempuan: (Analisis Gramscian Kandidat Perempuan Parlemen Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009)*. *Sosiohumaniora*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.5682>
- Wasi, I. (2020). *Politik, Partai Politik, Dan Perempuan Frontstage And Backstage Sebuah Catatan*. Deepublish.
- Wati, R. A. (2017). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Madiun (Studi Di Pemerintah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya.
- Yuniarti, M. D. (2020). Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.940>
- Yusfriadi, Y. (2020). *Komunikasi politik ulama Dayah tradisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen dalam Menghadapi Pilkada 2019)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zamroni, M. (2013). Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender. *Jurnal Dakwah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/jd.2013.14105>